EVALUASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Supangge Bagas
NPP. 33.0114

Program Studi Studi Kebijakan Pubik
Email: supanggebagas13@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si.
Email: sitizulaka@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (Gap): *The One Data Indonesia (SDI) policy in Asahan Regency has not been fully optimal despite Asahan Regency receiving the 2023 Smart City Movement Award. This issue is reflected in the unavailability of several types of data needed by the community on the One Data Indonesia portal, the incomplete implementation of data and metadata standards, and statistical publications that have not met the standards of the Sectoral Statistics Evaluation (EPSS). In addition, previous studies on SDI were generally conducted in regions that had not yet received Smart City recognition, creating a contextual gap in examining SDI implementation in regions with digital achievements but still facing challenges in public data utilization.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the evaluation of the One Data Indonesia policy in Asahan Regency, North Sumatra Province.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative method with a post-positivist approach and policy evaluation analysis based on which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness* (Dunn, 2018). *Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the ATLAS.ti application.* ***Results/ Findings:*** *The findings indicate that the implementation of the SDI policy in Asahan Regency has not yet been fully optimal. In terms of effectiveness and efficiency, coordination among regional agencies has been established, but the utilization of human resources and supporting facilities remains limited. In the dimensions of adequacy and equity, several strategic data needed by the community are not yet fully available on the SDI portal. Regarding responsiveness and appropriateness, the local government has attempted to provide public data, yet the quality, updating process, and conformity of data with established standards still require improvement.* ***ConclusPermasalhan/ion:*** *This study concludes that the evaluation of the One Data Indonesia policy in Asahan Regency has not been fully optimal due to challenges related to data quality, the implementation of data and metadata standards, and coordination among regional agencies.*

Keywords:*Data Quality, Local Government, One Data Indonesia, Policy Evaluation.*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya optimal meskipun Kabupaten Asahan telah memperoleh penghargaan Gerakan Menuju *Smart City* Tahun 2023. Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya data yang dibutuhkan masyarakat namun belum tersedia pada portal Satu Data Indonesia Kabupaten Asahan, belum terpenuhinya standar data dan metadata, serta publikasi statistik perangkat daerah yang belum sesuai dengan standar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Selain itu, penelitian terdahulu mengenai SDI umumnya dilakukan pada daerah yang belum memperoleh penghargaan *Smart City*, sehingga terdapat kesenjangan kontekstual dalam melihat implementasi SDI pada daerah yang telah

memiliki capaian digital namun masih menghadapi kendala pemanfaatan data oleh masyarakat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *post-positivisme* dan analisis evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan (Dunn, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan bantuan aplikasi ATLAS.ti. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan SDI di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi efektivitas dan efisiensi, koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan namun pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung masih terbatas. Pada dimensi kecukupan dan pemerataan, beberapa data strategis yang dibutuhkan masyarakat belum tersedia secara merata pada portal SDI. Pada dimensi daya tanggap dan ketepatan, pemerintah daerah telah berupaya menyediakan data publik, namun kualitas, pembaruan, serta kesesuaian data dengan standar masih perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam kualitas data, penerapan standar data dan metadata, serta koordinasi antar perangkat daerah.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Kualitas Data, Pemerintahan Daerah, Satu Data Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Data merupakan aset baru dalam sebuah organisasi, tata kelola data diperlukan agar data menjadi aset (Santos & Reinhard, 2012) Dalam era pemerintahan digital, kualitas data menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas data pemerintah dipengaruhi oleh aspek kelengkapan data, konsistensi, metadata, dan keterbaruan informasi yang tersedia bagi pengguna (Vetrò et al., 2016). Selain itu, kualitas portal data pemerintah yang baik membutuhkan harmonisasi standar dan pengelolaan data yang terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (Martın et al., 2016).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) berupaya menciptakan tata kelola data yang lebih baik agar data dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas data pemerintah melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi yang seragam (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir guna mendukung pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif. Secara teoritis, keberhasilan integrasi data pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan interoperabilitas antarorganisasi karena pertukaran dan pemanfaatan data memerlukan keselarasan aspek teknologi, manajemen, dan kebijakan (Pardo et al., 2012). Metadata yang terstandarisasi merupakan prasyarat penting untuk menjamin pertukaran dan integrasi data antarinstansi pemerintah(Bountouri et al., 2009).

Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang telah menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Asahan. Bahkan, Kabupaten Asahan berhasil memperoleh penghargaan Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan data yang terintegrasi.

Penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik (Rachman, 2021). Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak hanya memerlukan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga membutuhkan tata kelola data yang kuat agar data dapat digunakan sebagai dasar inovasi kebijakan dan peningkatan pelayanan publik

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan masih menghadapi berbagai permasalahan. Masih terdapat data yang dibutuhkan masyarakat namun belum tersedia pada portal Satu Data Kabupaten Asahan, seperti data lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, bantuan masyarakat miskin, dan data pendidikan. Selain itu, standar data dan metadata pada beberapa perangkat daerah belum diterapkan secara optimal serta publikasi statistik sektoral masih belum sesuai dengan standar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap data publik. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat melalui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan dalam mencapai tujuan kebijakan(Dunn, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai Satu Data Indonesia umumnya dilakukan pada daerah yang belum memperoleh penghargaan Smart City, sehingga lebih banyak menyoroti aspek administratif dan teknis pelaksanaan kebijakan. Penelitian (Anisa et al., 2023), (Triananta & Purnomo, 2023), serta (Irawan & Handayani, 2025) lebih berfokus pada implementasi kebijakan dan kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan SDI. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan kontekstual dalam penelitian ini karena Kabupaten Asahan merupakan daerah yang telah memperoleh capaian digital namun masih menghadapi kendala dalam penyediaan dan pemanfaatan data publik oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018)yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan, hambatan, serta upaya perbaikan dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan.

.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan tersebut terlihat dari masih terbatasnya ketersediaan data publik yang dibutuhkan masyarakat pada portal Satu Data Kabupaten Asahan, seperti data lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, bantuan masyarakat miskin, data pendidikan, dan data pembangunan daerah. Padahal, kebijakan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan (Prabujaya et al., 2024). Selain itu, menurut Kementerian PPN/Bappenas, SDI bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi yang seragam.

Kabupaten Asahan sendiri telah memperoleh penghargaan Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penghargaan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan data daerah. Penerapan e-government menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik(Rachman, 2021). Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian formal pemerintah daerah dengan pemanfaatan data publik yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil survei Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, masih terdapat berbagai jenis data yang sangat dibutuhkan masyarakat

namun belum tersedia pada portal SDI Kabupaten Asahan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan informasi publik secara optimal.

Permasalahan lainnya terlihat pada penerapan standar data dan metadata yang belum berjalan maksimal di beberapa perangkat daerah. Selain itu, publikasi statistik sektoral yang dihasilkan perangkat daerah masih banyak yang belum memenuhi standar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan. Menurut Dunn (2018), keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan SDI di Kabupaten Asahan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan Satu Data Indonesia telah dilakukan di beberapa daerah seperti Kota Salatiga, Kabupaten Sleman, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Banten. Penelitian (Anisa et al., 2023) berfokus pada kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan SDI di Kota Salatiga. (Triananta & Purnomo, 2023) meneliti pengembangan kebijakan Satu Data dalam pelayanan publik di Kabupaten Sleman, sedangkan (Prabujaya et al., 2024) mengkaji implementasi kebijakan SDI dalam mewujudkan open government data di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya (Nuryana & Junaidi, 2025) dan (Irawan & Handayani, 2025) lebih menyoroti implementasi kebijakan SDI dan faktor penghambatnya di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Banten. Penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menekankan aspek implementasi, administratif, dan teknis kebijakan tanpa melihat keterkaitan antara capaian digital pemerintah daerah dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap keterbukaan data publik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia pada daerah yang telah memperoleh penghargaan Smart City namun masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan data masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kontekstual tersebut dengan menganalisis evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018)yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya optimal meskipun daerah tersebut telah memperoleh penghargaan Smart City Tahun 2023. Masih terdapat berbagai data publik yang dibutuhkan masyarakat namun belum tersedia pada portal SDI, serta belum optimalnya penerapan standar data dan metadata antar perangkat daerah. Penelitian ini penting secara keilmuan karena masih terbatasnya kajian evaluasi kebijakan SDI pada daerah yang telah memiliki capaian digital namun masih menghadapi kendala pemanfaatan data publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola data dan pelayanan publik berbasis digital. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris dalam memahami hambatan pelaksanaan kebijakan SDI sehingga upaya perbaikan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan kebutuhan data masyarakat tidak terpenuhi secara optimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan tata kelola data pemerintahan. (Anisa et al., 2023) mengkaji kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dengan pendekatan collaborative governance. (Triananta & Purnomo, 2023) meneliti pengembangan kebijakan Satu Data dalam pelayanan publik di Kabupaten Sleman menggunakan

pendekatan implementasi kebijakan. (Prabujaya et al., 2024) membahas implementasi kebijakan SDI dalam mewujudkan open government data di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya,(Nuryana & Junaidi, 2025) meneliti implementasi kebijakan SDI di Provinsi Bangka Belitung sedangkan (Irawan & Handayani, 2025) mengkaji implementasi SDI di Provinsi Banten dengan fokus pada faktor kekuatan dan kelemahan kebijakan. Secara umum, penelitian terdahulu didominasi metode kualitatif dengan fokus pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018).

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada konteks objek penelitian, yaitu evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan yang telah memperoleh penghargaan Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023 namun masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan data publik masyarakat. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi kebijakan, kolaborasi stakeholder, serta faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan SDI di daerah yang masih dalam tahap pengembangan tata kelola data digital. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan (Dunn, 2018) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian evaluasi kebijakan publik berbasis digital, khususnya terkait tata kelola data pemerintahan daerah melalui kebijakan Satu Data Indonesia.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan post-positivisme, metode ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori (Nurdin & Hartati, 2019). Pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan proses implementasi, hambatan, dan dinamika antaraktor kebijakan (Ruhana, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan informan dan lingkungan penelitian (Sartika & Wargadinata, 2018). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menganalisis dan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga ingin memahami proses pelaksanaan, hambatan, serta kondisi nyata yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan SDI di lingkungan pemerintah daerah. Analisis penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan (Dunn, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami objek penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam (Tungka & Ridwan, 2024). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan sebagai walidata daerah dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan SDI, Kepala Bidang

Statistik dan Persandian, operator data pada perangkat daerah, serta masyarakat pengguna data publik. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, dan penerima manfaat kebijakan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Pengujian keabsahan data diperlukan untuk memastikan data penelitian memiliki tingkat konsistensi, objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rahma et al., 2022).Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan bantuan aplikasi ATLAS.ti untuk mempermudah pengelompokan dan analisis hasil wawancara.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebagai lokus utama penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Februari hingga April 2026 yang mencakup observasi lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi terkait kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan.

III. HASIL PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dengan judul Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2018)yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yakni, efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efektivitas

Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu memberikan hasil yang sesuai atau mendekati tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut merupakan indikator pada dimensi efektivitas.

1. Kesesuaian hasil dengan target

Dari sisi target, Diskominfo sebagai walidata memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Asahan. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber yang menyebutkan adanya peningkatan nilai indeks SDI dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan ini dapat didukung oleh data yang ada mengenai indeks SDI Kabupaten Asahan tahun 2024-2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Nilai Indeks SDI Kabupaten Asahan

No.	Tahun	Nilai Indeks SDI	Keterangan
1.	2024	49,94	Kurang
2.	2025	62,68	Cukup

Sumber: Data Bappenas, diperoleh dari DISKOMINFO Kabupaten Asahan, (2026)

Berdasarkan hasil analisis koding wawancara dan triangulasi dengan data sekunder di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian hasil dengan target dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan sudah mulai tercapai, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan nilai SDI. Akan tetapi, belum adanya target yang ditetapkan secara spesifik.

2. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi diketahui bahwa tujuan kebijakan Satu Data Asahan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum meratanya

pemahaman OPD terhadap standar data, kurangnya konsistensi dalam pembaruan data, serta masih perlunya pendampingan dalam proses integrasi data.

3.2 Efisiensi

Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. Berikut merupakan indikator pada dimensi efektivitas.

1. Waktu yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa indikator waktu yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan belum sepenuhnya efisien. Hal ini disebabkan oleh masih adanya keterlambatan dalam pembaruan data, ketidaklengkapan *metadata*, serta belum meratanya pemahaman OPD terhadap standar pengelolaan data.

2. Pemanfaatan SDM

Dalam konteks kebijakan publik, pemanfaatan SDM juga berkaitan dengan tingkat pemahaman, keterampilan, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil analisis koding wawancara dan data-data yang ada, peneltiti menyimpulkan bahwa Indikator Pemanfaatan SDM sudah dilakukan cukup optimal, dimana pemerintah melakukan peningkatan kapasitas melalui koordinasi, pengarahan dan pengarahan guna mengoptimalkan pemanfaatan SDM. Namun, tetap diperlukan peningkatan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang.

3.3 Kecukupan

Dalam konteks kebijakan publik, kecukupan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya hasil, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi hasil tersebut dalam mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Berikut merupakan indikator pada dimensi efektivitas.

1. Ketersediaan Data

Dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan, ketersediaan data berkaitan dengan sejauh mana data sektoral dari setiap OPD telah tersedia, lengkap, dan dapat diakses melalui sistem yang telah disediakan. Ketersediaan data juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang komprehensif dan berkelanjutan. ketersediaan data pada sektor-sektor penting sejalan dengan data yang ada mengenai jumlah dataset yang teradapat pada portal Satu Data Indonesia kabupaten Asahan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Jumlah Data dan Jenisnya Pada Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Asahan

NO	Jenis Data	Jumlah
1	Sumber Daya Manusia	60
2	Pemerintahan	59
3	Kesehatan	54
4	Sosial	49
5	Pertanian	47
6	Pendidikan	39
	Kependudukan	30
7	Ekonomi	29
8	Lingkungan	23
9	Infrastruktur	21

NO	Jenis Data	Jumlah
10	Ketenagakerjaan	21
11	Peternakan	9
12	Hukum dan HAM	8
13	Pariwisata dan Olahraga	5
14	Perikanan dan Kelautan	5
15	Lainnya	4
16	Keamanan dan Ketertiban	2
17	Budaya	1

Sumber: Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Asahan, (2026)

Berdasarkan hasil analisis koding wawancara dan data-data yang ada, peneltiti menyimpulkan bahwa ketersediaan data dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan sudah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dimiliki telah mencakup berbagai sektor, tetapi masih memerlukan pelengkapan, pembaruan, dan dokumentasi yang lebih baik.

2. Pemenuhan Kebutuhan

Indikator pemenuhan kebutuhan dapat dilihat dari sejauh mana data yang disediakan telah sesuai dengan standar nasional serta mampu menjawab kebutuhan data di tingkat daerah. Peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh kesesuaian data dengan standar nasional serta kemampuan untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan daerah.

3.4 Pemerataan

Pemerataan merupakan salah satu dimensi yang berfokus pada distribusi hasil kebijakan, apakah kebijakan tersebut telah tersebar secara merata atau masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks kebijakan publik, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil, tetapi juga mencakup kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan kebijakan tersebut. Berikut merupakan indikator pada dimensi efektivitas.

1. Pemerataan Akses Data

Berdasarkan hasil analisis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerataan akses data dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan telah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi ketersediaan sistem dan keterbukaan akses kepada masyarakat. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pemerataan akses, seperti memberikan pendampingan, arahan penggunaan sistem, serta menjaga keamanan dan validitas data.

2. Distribusi Manfaat SDI

Dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan, distribusi manfaat dapat dilihat dari sejauh mana data yang tersedia melalui portal Satu Data Asahan dimanfaatkan oleh OPD sebagai dasar pengambilan keputusan serta oleh masyarakat sebagai sumber informasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa distribusi manfaat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan telah berjalan dengan cukup baik. Manfaat kebijakan telah dirasakan oleh berbagai pihak, baik oleh OPD dalam proses pemerintahan maupun oleh masyarakat dalam mengakses informasi publik.

3.5 Daya Tanggap

Dalam konteks kebijakan publik, daya tanggap tidak hanya dilihat dari kecepatan respon, tetapi juga dari kesesuaian tindakan yang diambil dalam menjawab kebutuhan yang ada. Suatu kebijakan

dikatakan memiliki daya tanggap yang baik apabila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikut merupakan indikator pada dimensi daya tanggap.

1. Respon Pemerintah Menyediakan Data

Indikator ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah, khususnya melalui Diskominfo dan OPD terkait, merespons permintaan data, baik melalui sistem portal Satu Data Asahan maupun melalui koordinasi antar instansi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyediakan data secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan data dan koordinasi agar respon pemerintah dapat menjadi lebih cepat, konsisten, dan optimal dalam memenuhi kebutuhan data.

2. Penyesuaian Kebutuhan Data dengan Isu Strategis

Indikator ini dapat dilihat dari kesesuaian pengelolaan data dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan data dengan kebutuhan pembangunan daerah. Data yang dihasilkan kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebutuhan strategis nasional sejalan dengan nilai yang dimiliki oleh Kabupaten Asahan dalam penilaian Indeks Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan yang telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Asahan Tahun 2025

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	71.95
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	57.48
3	Domain Data Leadership	24%	67.11
Indeks Satu Data Indonesia			**62.68**

Sumber: Data Bappenas, diperoleh dari DISKOMINFO Kabupaten Asahan, (2026)

Peneltiti menyimpulkan bahwa penyesuaian kebutuhan data dengan isu strategis dalam implementasi kebijakan Satu Data Asahan telah berjalan dengan cukup baik. Data yang dikelola telah mengacu pada standar nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta didukung oleh koordinasi antar instansi.

3.6 Ketepatan

Ketepatan tidak hanya melihat apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah hasil yang dicapai tepat sasaran, relevan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak yang membutuhkan. ketepatan menjadi penting karena suatu program dapat saja berjalan dengan baik secara administratif, namun belum tentu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikut merupakan indikator pada dimensi Ketepatan.

1 Pemenuhan Kebutuhan Data

Indikator pemenuhan kebutuhan data dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana data yang dihasilkan dan disediakan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara tepat, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kelengkapan. peneliti menyimpulkan bahwa data yang tersedia umumnya telah relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan *metadata*, konsistensi pembaruan, dan kontribusi data dari seluruh OPD. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kepatuhan OPD dalam melengkapi *metadata*, menjaga konsistensi pembaruan data, serta memperkuat pengawasan dan koordinasi agar seluruh data yang dihasilkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh.

2. Kesesuaian Data dengan Kebutuhan Masyarakat

Indikator kesesuaian data dengan kebutuhan masyarakat dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana data yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara tepat. Kesesuaian ini mencakup aspek relevansi, kelengkapan, serta kemampuan data dalam mendukung berbagai kepentingan. Indikator kesesuaian data dengan kebutuhan masyarakat dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana data yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara tepat. Kesesuaian ini mencakup aspek relevansi, kelengkapan, serta kemampuan data dalam mendukung berbagai kepentingan.

Berdasarkan hasil analisis koding wawancara dan triangulasi dengan data sekunder di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian data dengan kebutuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan telah menunjukkan arah yang positif. Data yang tersedia umumnya telah mengikuti standar nasional dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara umum.

3.7 Diskusi Temuan Umum Penelitian

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan memberikan dampak positif terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan keterbukaan data publik. Penulis menemukan temuan utama bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah memiliki komitmen yang cukup baik dalam mendukung implementasi kebijakan SDI, terlihat dari keberhasilan memperoleh penghargaan Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023 serta tersedianya portal Satu Data Kabupaten Asahan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah melalui forum Satu Data Indonesia dan pembinaan statistik sektoral juga telah dilaksanakan secara rutin. Sama halnya dengan temuan penelitian (Anisa et al., 2023) bahwa kolaborasi antar stakeholder menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam penelitian ini, Diskominfo Kabupaten Asahan berperan sebagai walidata daerah yang menghubungkan berbagai perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan SDI di Kabupaten Asahan masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan belum optimalnya penerapan standar data dan metadata, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum lengkapnya data publik yang tersedia pada portal SDI. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Prabujaya et al., 2024) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia masih terkendala oleh kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Nuryana & Junaidi, 2025)yang menyatakan bahwa pemutakhiran data secara berkala masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

Berbeda dengan penelitian (Triananta & Purnomo, 2023) yang menilai pengembangan kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman telah mampu mendukung pelayanan publik secara optimal, penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan data masyarakat di Kabupaten Asahan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Masih terdapat data yang dibutuhkan masyarakat seperti data bantuan sosial, lapangan pekerjaan, dan data pembangunan daerah yang belum tersedia secara lengkap pada portal SDI Kabupaten Asahan. Perbedaan temuan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian dan tingkat kesiapan tata kelola data pada masing-masing daerah.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian digital pemerintah daerah dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap keterbukaan data publik. Kabupaten Asahan sebagai daerah penerima penghargaan *Smart City* ternyata masih menghadapi kendala dalam penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Temuan ini berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan teknis implementasi kebijakan SDI tanpa mengaitkan dengan tingkat pemanfaatan data publik oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan telah berjalan cukup baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital, namun masih memerlukan peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, optimalisasi penerapan standar data dan metadata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan kebijakan SDI dapat tercapai secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lainnya dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Asahan. Salah satu faktor penghambat utama yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pengelolaan data, standar data, dan metadata pada masing-masing perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembaruan data dan integrasi data antar instansi belum berjalan secara optimal. Selain itu, masih terdapat perangkat daerah yang belum secara rutin melakukan pemutakhiran data pada portal Satu Data Kabupaten Asahan sehingga kualitas data yang tersedia belum sepenuhnya akurat dan mutakhir.

Penulis juga menemukan bahwa koordinasi antar perangkat daerah masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kebijakan SDI. Meskipun forum koordinasi Satu Data Indonesia telah dilaksanakan, namun sinkronisasi data antar perangkat daerah masih belum maksimal. Beberapa perangkat daerah masih memiliki perbedaan format dan standar pengelolaan data sehingga menyulitkan proses integrasi data daerah secara menyeluruh.

Selain faktor penghambat, penulis menemukan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan SDI di Kabupaten Asahan yaitu adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal tersebut terlihat dari pembentukan walidata daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, pengembangan portal Satu Data Kabupaten Asahan, serta pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada perangkat daerah. Keberhasilan Kabupaten Asahan memperoleh penghargaan Gerakan Menuju *Smart City* Tahun 2023 juga menunjukkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan data digital.

Temuan menarik lainnya yaitu adanya kesenjangan antara capaian digital pemerintah daerah dengan kebutuhan data masyarakat. Meskipun Kabupaten Asahan telah memiliki portal Satu Data, masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh beberapa jenis data publik tertentu seperti data bantuan sosial, lapangan pekerjaan, dan data pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya diukur dari keberadaan sistem digital, tetapi juga dari sejauh mana data yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.

3.9 KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara telah berjalan cukup baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penyediaan portal Satu Data Kabupaten Asahan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan statistik sektoral. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum optimal karena masih terdapat keterbatasan ketersediaan data publik, belum maksimalnya penerapan standar data dan metadata, serta belum optimalnya pembaruan data secara berkala pada beberapa perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara capaian digital pemerintah daerah dengan pemenuhan kebutuhan data masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Asahan meningkatkan kualitas pengelolaan data, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mengoptimalkan penerapan standar data dan metadata, serta meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia guna mendukung penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu dan cakupan penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan dengan fokus utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai walidata daerah, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada seluruh perangkat daerah secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada cakupan yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak perangkat daerah maupun perbandingan antar daerah yang telah menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam terkait efektivitas tata kelola data pemerintahan berbasis digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian terkait kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Asahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan, perangkat daerah, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anisa, Z. L. N., Sunu, R., & Zarkasyi, A. (2023). Proses kolaborasi kebijakan satu data salatiga dalam menyediakan informasi publik di kota salatiga. *Journal of Management and Public Policy*, *12*(3), 896–913. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/40042

Bountouri, L., Papatheodorou, C., Soulikias, V., & Stratis, M. (2009). Metadata interoperability in public sector information. *Journal of Information Science*, *35*(2), 204–231. https://doi.org/10.1177/0165551508098601

DISKOMINFO Kabupaten Asahan. (2026a). *Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Asahan Tahun 2025*.

DISKOMINFO Kabupaten Asahan. (2026b). *Nilai Indeks SDI Kabupaten Asahan*.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis an integrated approach*. Routledge, New York.

Irawan, S., & Handayani, R. (2025). analisis implementasi kebijakan satu data indonesia (SDI) di pemerintah provinsi banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(1), 1–16. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Prinsip Satu Data Hasilkan Data yang Akurat Bagi Pembangunan*. https://www.bappenas.go.id/berita/prinsip-satu-data-hasilkan-data-yang-akurat-bagi-pembangunan-h4w82

Martın, A. S., Rosario, A. H. De, & Pe´rez, M. D. C. C. (2016). An international analysis of the quality of open government data portals. *Social Science Computer Review*, *34*(3), 298–311. https://doi.org/10.1177/0894439315585734

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendikia Surabaya.

Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi kebijakan penyelenggaraan satu data indonesia di dinas komunikasi dan informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Palembang*, *10*(2), 356–383.

https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266
Pardo, T. A., Nam, T., & Burke, G. B. (2012). E-Government Interoperability: interaction of policy, management, and technology dimensions. *Social Science Computer Review*, *30*(1), 7–23. https://doi.org/10.1177/0894439310392184
Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Asahan. (2026). *Jumlah Data dan Jenisnya Pada Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Asahan*.
Prabujaya, S. P., Aryansah, J. E., & Febriansyah, M. F. (2024). Implementasi kebijakan satu data dalam mewujudkan Open Government data di Provinsi Sumatera Selatan. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya*, *4*(2), 18–33. https://www.researchgate.net/publication/384873984_Implementasi_Kebijakan_Satu_Data_dalam_mewujudkan_Open_Government_Data_di_Provinsi_Sumatera_Selatan
Rachman, R. (2021). Analisa Kesuksesan E - Government LAPOR dengan Model Delone - Mclean pada Pengembangan Smart City. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, *10*(2), 357–368. https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i2.1236
Rahma, M., Ekowati, M., Nallen, E. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN TERAPAN*. CV. Sketsa Media.
Ruhana, F. (2018). *Modul Mata Kuliah: Metode Penelitian Sosial*. IPDN.
Santos, E. M. dos, & Reinhard, N. (2012). Electronic Government Interoperability : Identifying the Barriers for Frameworks Adoption. *Social Science Computer Review*, *30*(1), 71–82. https://doi.org/10.1177/0894439310392196
Sartika, I., & Wargadinata, E. L. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. IPDN Press.
Triananta, M. N., & Purnomo, E. P. (2023). Pengembangan kebijakan satu data dalam pelayanan publik di Kabupaten Sleman. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *22*(2), 195–206. https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.600
Tungka, N. F., & Ridwan. (2024). *METODE PENELITIAN*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework : De fi nition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly*, *33*(2), 325–337. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001